



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI VII DPR RI
KE PUSAT PENGEMBANGAN LISTRIK
TENAGA MIKRO HIDRO
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG JAWA TIMUR
TANGGAL 04 S.D. 06 JANUARI 2021

MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2020-2021

KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
2021

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, adalah sumber daya energi. Faktor energi memiliki peranan yang sangat besar, karena menjadi pendorong utama bagi perkembangan sektor yang lainnya. Indonesia memiliki potensi sumber energi fosil maupun non-fosil. Kebijakan energi – Indonesia – selama ini, lebih menitikberatkan pada eksploitasi energi fosil. Padahal, keterbatasan energi fosil ini tidak renewable dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang cukup besar. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang besar, pemerintah mencoba merubah dari energi fosil ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia berusaha melakukan penggunaan energi terbarukan atau energi yang ramah lingkungan ini, sesuai dengan visi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mengembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak. Juga tertuang dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pada tahun 2025. Dimana peran EBT dalam bauran energi Nasional ditargetkan dapat mencapai 23% dan terus meningkat menjadi 31% pada tahun 2050 mendatang.

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong percepatan lahirnya undang-undang EBT yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak swasta ataupun lembaga internasional yang ingin berinvestasi disektor energi baru dan terbarukan di Indonesia. Pemerintah juga mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Energi Terbarukan (BPET), yakni badan yang akan mengkoordinasikan implementasi kebijakan-kebijakan di sektor energi hijau. Walaupun sebenarnya, pemerintah Indonesia sendiri sudah memiliki Ditjen EBTKE yang berada dibawah Kementerian ESDM yang mengatur berbagai kebijakan terkait EBT. Disamping itu, keberadaan teknologi di bidang nuklir

yang semakin berkembang, yang dapat diimplementasikan melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga luklir modular yang berukuran tidak terlalu besar perlu kita dikaji.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya alam serta kegiatan riset dan teknologi, memandang perlu untuk menjadikan Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur sebagai obyek Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun (2020 – 2021). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penyusunan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta sebagai pelaksanaan pengawasan, dan sebagainya. Melalui kunjungan spesifik ini, diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang-bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya.

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib beserta Perubahannya.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 - 2021.

III. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Maksud diadakannya Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah, khususnya dalam rangka penyusunan RUU EBT. Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

Mendapatkan data, informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi serta riset dan teknologi di Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang.

Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya di sektor energi serta riset dan teknologi.

Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah.

Melihat secara langsung kinerja yang dilaksanakan mitra komisi VII DPR RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang.

Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi non-fosil, khususnya Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

IV. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN, DAN AGENDA KEGIATAN

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 04 – 06 Januari 2021 dengan tujuan kunjungan ke Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur dengan agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Pimpinan Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang, Rektor UMM, Civitas Akademika UMM, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, PT Pertamina, PT PLN (Persero), dan instansi terkait lainnya.
2. Pertemuan dengan Pimpinan Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang, yang dihadiri oleh Rektor UMM, Civitas Akademika UMM, Dirjen EBTKE KESDM, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN, terkait permasalahan-permasalahan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.

V. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI ke Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Riset dan Teknologi (Ristek), serta ketenagalistrikan.

Hasil kegiatan kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan penyusunan RUU EBT dan sebagai fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

VI. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai pihak kunci dan melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat mendatang Komisi VII DPR RI.

VII. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi.

**DAFTAR NAMA ANGGOTA
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
KE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR
TERKAIT MASUKAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU EBT
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 4 S.D 6 FEBRUARI 2021**

NO.	NAMA	NO. ANGG.	FRAKSI	JABATAN
1.	SUGENG SUPARWOTO	A-373	P.NASDEM	KETUA TIM
2.	MERCY CHRIESTY BARENDS, ST	A-261	PDI-P	ANGGOTA
3.	H. NASYIRUL FALAH AMRU, SE	A-223	PDI-P	ANGGOTA
4.	Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.	A-244	PDI-P	ANGGOTA
5.	dr. H. SULAIMAN UMAR SIDDIQ	A-247	PDI-P	ANGGOTA
6.	H. HASNURYADI SULAIMAN, SE, M.A.B	A-336	P. GOLKAR	ANGGOTA
7.	MAMAN ABDURAHMAN. ST	A-332	P. GOLKAR	ANGGOTA
8.	Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI W., M.Si	A-321	P. GOLKAR	ANGGOTA
9.	MORENO SOEPRAPTO	A-110	P. GERINDRA	ANGGOTA
10.	H. SYAIKHUL ISLAM, Lc. M.Sosio	A-31	PKB	ANGGOTA
11.	MUHAMMAD NASIR	A-530	P.DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	DRS. H. ANAWAR IDRIS	A-460	PPP	ANGGOTA

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN

I. PUSAT PENGEMBANGAN LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO UMM

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengkaji RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) yang diadakan dalam *Forum Group Discussion* (FGD) untuk membahas RUU tersebut lebih dalam. Dalam acara ini, dihadiri oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, Bupati Malang, H. M. Sanusi, Rektor UMM, serta jajaran direktur Pertamina Power Indonesia, PJB PLN, Aneka EBT Ditjen EBTKE, serta PLN UID Jatim. Selain itu hadir pula tim khusus tenaga ahli dan peneliti Pusat Pengkajian dan Penerapan Energi Baru dan Terbarukan dari UMM yang diketuai oleh Ir. Sudarman, M.T.

Dalam sambutannya, Sugeng Suparwoto selaku ketua komisi VII DPR RI menjelaskan bahwa kehadiran dan pilihan mereka di UMM bukan tanpa alasan. Mengingat UMM sebagai institusi pendidikan yang mengangkat masalah energi baru terbarukan, yang dibuktikan dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang sudah dibangun dan dimiliki oleh UMM. Kunjungan spesifik ini, juga menjadi bentuk dari usaha Komisi VII DPR RI untuk mempercepat penyusunan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang sudah kami siapkan.



UU adalah salah satu dasar untuk menuju kepastian hukum, yang lalu memang ada tetapi tidak menjadi satu kesatuan yang komprehensif jadi masih terpisah-pisah. DPR tidak dapat memutuskan secara sepihak. Oleh karena itu, diperlukan peran dari beberapa tokoh, stakeholder hingga kalangan akademisi untuk memberikan masukan. Posisi legislatif oleh DPR secara struktural di negara ini, mempunyai tugas dan target yang dinanti manfaatnya oleh seluruh masyarakat. UU EBT ini, insyaallah ditargetkan bulan Oktober 2021 ini sudah tuntas. Dimana Draf undang undang yang sudah diselesaikan per hari ini, sudah mencapai 59 pasal, 14 bab.



Di era energi terbarukan, memang tidak bisa dielakkan lagi. Karena energi fosil sudah mengalami masalah, baik ketersediannya maupun keharusan untuk menguranginya. Apalagi melihat potensi EBT di Indonesia yang mencapai 442 gigabyte watt. Maka dari itu, DPR RI Komisi VII yang memiliki fungsi legislasi harus segera menuntaskan RUU terkait EBT ini. RUU ini juga bisa menjadi pintu masuk dalam menentukan sikap Indonesia ke depannya. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo

sudah menandatangani *Paris Agreement*. Kesepakatan tersebut juga sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Salah satu komitmen dan fokus utamanya, adalah mengurangi emisi karbon sebesar 29% di tahun 2030 nanti. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk meraih tujuan tersebut, yang salah satunya dengan energi baru terbarukan yang *clean* dan *renewable*. Jadi, perlu adanya keputusan politik yang bulat dan penuh untuk mendukungnya.

Sementara Bupati Malang H. M. Sanusi, M.M. mengatakan, bahwa agenda ini dapat menyatukan berbagai pihak yang berkompeten untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Ada pihak ulama dengan ilmunya yang diwakili oleh pihak civitas akademika UMM. Kemudian umara dengan kewenangannya yang diwakili oleh ketua dan anggota DPR yang hadir. Pihak *aghniya'* yang direpresentasikan oleh para direktur yang hadir. Dan terakhir, adalah para masyarakat yang akan membantu lahirnya inovasi pemberi manfaat. Malang memang memiliki potensi yang besar, utamanya dalam aspek sumber daya air yang nantinya bisa digunakan. Oleh karena itu, ia berharap agar kedatangan DPR ke Malang ini bisa membawa berkah bagi masyarakat yang membutuhkan.



Sedangkan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Fauzan, M.Pd, mengatakan bahwa dirinya berharap agar kunjungan ini bisa memberi manfaat dan umpan balik bagi bangsa dan negara. Serta tidak lupa

juga hilirasi riset yang dilakukan UMM, yang nantinya tidak hanya membahas secara teori tapi juga mengimplementasikannya. Tidak hanya mencakup fungsi parsial, tapi lebih luas lagi yakni kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Hingga pada akhirnya, agenda ini mampu menghasilkan rumusan yang nantinya bisa dirasakan oleh seluruh anak bangsa Indonesia.

Secara prinsip, Indonesia sudah siap dalam pengembangan EBT. Namun banyak hal yang masih perlu dikaji ulang dengan wujud ekspansi dan eksekusinya. Sehingga perlu ada kerjasama dengan stakeholder maupun organisasi sosial lain. Pihaknya juga bertekad akan selalu melakukan komunikasi agar pengembangan EBT ini semakin signifikan. Oleh karena itu, pihaknya sangat berterimakasih sekali kepada Komisi VII DPR RI yang mendorong pembangunan di bidang EBT, sehingga menghasilkan rumusan yang bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa.



Kemudian dalam sesi FGD tersebut, Suwignyo selaku yang mewakili Tenaga Ahli dan Peneliti Pusat Pengkajian dan Penerapan Energi Baru dan Terbarukan UMM, mengatakan bahwa secara substansi isi dan cakupan RUU EBT sudah komprehensif. Namun, perlu adanya perhatian khusus terkait dengan harga intensif guna mencapai cakupan bauran EBT dalam

meningkatkan ketahanan dan kemandirian energy. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar aspek pendidikan bisa dimasukkan ke dalam RUU tersebut dan agar solusi pengembangan EBT dari UMM ini dapat digunakan menjadi rujukan nasional.

Dengan demikian, kunjungan Komisi VII DPR RI ke Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur, yang bertujuan untuk mengkaji RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) yang diadakan dalam Forum Group Discussion (FGD) ini telah memberikan gambaran bahwa secara substansi isi dan cakupannya sudah komprehensif dan tinggal adanya perhatian khusus terkait dengan harga intensif guna mencapai cakupan bauran EBT dalam meningkatkan ketahanan dan kemandirian energy. Disampaing itu, juga tinggalkan bagaimana pelaksanaannya tersebut dapat cepat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.



BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur, maka dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mengapresiasi kinerja Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur.
2. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meminta saran, masukan, dan sumbangsih Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur, agar menjadi percontohan dan sumber rujukan energi baru dan terbarukan di Indonesia, serta RUU EBT sesegera mungkin dapat diselesaikan dan dilaksanakan.
3. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mengapresiasi komitmen Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, UMM dalam mendukung Pemerintah Pusat, khususnya Komisi VII DPR RI untuk merampungkan dan mengimplementasikan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia.
4. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mendorong Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, UMM, untuk dapat memaksimalkan seluruh potensi energi baru dan terbarukan yang ada di Kabupaten Malang.
5. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mendorong Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, UMM, untuk menjadi corong pusat kajian Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia.
6. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mendesak PT PLN, Aneka EBT, dan Ditjen EBTKE, untuk segera meninjau kembali peraturan yang memberatkan dan yang menjadi kendala dalam merealisasikan energi baru dan terbarukan, sehingga proyek energi baru dan terbarukan dapat terealisasi dengan baik dan mencapai nilai kelayakan ekonomis.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur dengan harapan dapat memperkaya pemikiran, masukan dan pertimbangan bagi Komisi VII DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusionalnya.

Jakarta, 06 Februari 2021

Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI

Ketua Tim,

SUGENG SUPARWOTO